

Perspektif Mahasiswa Universitas Negeri Medan Mengenai Tindak Korupsi yang Merusak Integritasi Nasional

Agatha Mariana Turnip¹ Fadhillah Rahma Siregar² Lois Maretta Br Sitepu³ Nurul fadhillah Batubara⁴ Raisa Ann Michelle⁵ Oksari Anastasya Sihaloho⁶

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Medan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Email:

Abstract

This research aims to understand students' perspectives on corruption which damages national integrity using descriptive qualitative methods through interviews. The research results show that students see corruption as a significant threat to the nation's moral, social and economic aspects. They also identified weak law enforcement, a culture of permissiveness, and a lack of transparency as key factors fueling corruption. Students suggested the importance of anti-corruption education and strengthening the value of integrity as a long-term solution. In conclusion, eradicating corruption requires an active role from all parties, including students, in strengthening national integrity.

Keywords: Corruption, National Integrity, Student Perspective, Anti-Corruption Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif mahasiswa terhadap korupsi yang merusak integritas nasional menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa melihat korupsi sebagai ancaman signifikan bagi moral, sosial, dan ekonomi bangsa. Mereka juga mengidentifikasi lemahnya penegakan hukum, budaya permisif, dan kurangnya transparansi sebagai faktor utama yang memicu korupsi. Mahasiswa menyarankan pentingnya pendidikan anti-korupsi dan penguatan nilai integritas sebagai solusi jangka panjang. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk mahasiswa, dalam memperkuat integritas nasional.

Kata Kunci: Korupsi, Integritas Nasional, Perspektif Mahasiswa, Pendidikan Anti-Korupsi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia, dengan dampak yang luas terhadap masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak integritas nasional dan menghambat kemajuan sosial-ekonomi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi biasanya mencakup kategori seperti kegiatan ilegal, penyalahgunaan kekuasaan, peluang atau dana, juga memperkaya diri sendiri, dari orang atau perusahaan lain, dan merugikan dana pemerintah. Banyak pejabat pemerintah dari semua tingkatan terlibat korupsi dan ditangkap oleh penyidik KPK. Oleh karena itu kejahatan korupsi harus diajarkan kepada seluruh masyarakat sejak dini agar tidak terus berlanjut khususnya di Indonesia. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 tindak pidana korupsi yang terbagi dalam tujuh jenis yaitu kerugian dana negara, penyuapan, penggelapan, pencurian, penipuan, pertikaian. Saat membeli barang dan jasa, dan harganya. Pada dasarnya pengertian korupsi adalah penyalahgunaan suatu jabatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Seluruh aspek pemerintahan rentan terhadap korupsi. Korupsi mempunyai intensitas yang berbeda-beda, mulai dari korupsi sederhana yang berupa penggunaan pengaruh dan bantuan untuk memberi dan menerima bantuan, hingga korupsi serius yang diketahui dan sebagainya. ketika perilaku konsumen dan sistem politik masyarakat terus berfokus pada

kekayaan, risiko perjudian meningkat dan berujung pada korupsi. Korupsi adalah sebuah proses yang tidak akan berhenti kecuali persepsi kekayaan berubah. Semakin banyak orang yang terobsesi dengan kekayaan, semakin banyak pula korupsi yang terjadi. Korupsi terjadi karena dua sebab utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi adalah:

1. Faktor internal. Faktor internal adalah penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari perseorangan. Sifat manusia sering dilihat dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Kesenak-senangan adalah kecenderungan orang untuk merasa kekurangan terhadap apa yang dimilikinya, atau dianggap tidak bersyukur. Orang serakah menambah kekayaan dan kekayaannya dengan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti korupsi. Kurangnya Kekuatan Moral Orang yang kurang memiliki kekuatan moral mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Salah satu penyebab korupsi adalah pembalikan kekuasaan manusia dalam hidupnya. Ketika seseorang kurang bermoral atau kurang mampu beradaptasi, maka ia mudah terpengaruh oleh pengaruh luar. Kesejahteraan Konsumen Kesejahteraan merupakan salah satu penyebab korupsi karena faktor eksternal. Jika seseorang hidup subsisten dan penghasilannya kurang dari makanan, maka dialah penyebab korupsi. Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. b. Tergantung kondisi sosial Tergantung kondisi sosial, seseorang bisa saja melakukan korupsi. Hal ini terjadi dengan dorongan dan dukungan dari keluarga, bahkan ketika orang-orang tampaknya tidak menginginkannya. Dalam hal ini, lingkungan mendorong terjadinya korupsi dibandingkan menghukumnya.
2. Faktor eksternal Faktor eksternal penyebab korupsi dapat dipengaruhi kuat dari luar, beberapa diantaranya dapat dilihat dari kondisi tertentu: ciri-ciri masyarakat melakukan korupsi Penyebabnya korupsi dalam situasi ini adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat mengarah pada korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa korban sesungguhnya dan korban sesungguhnya dari korupsi adalah diri mereka sendiri. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu perlu adanya pelatihan komunikasi dan kesadaran untuk menghadapi korupsi yang terlihat di masyarakat ini. Faktor ekonomi Faktor ekonomi mirip dengan perilaku konsumen berdasarkan faktor internal. Bedanya, bobot di sini ditempatkan pada pendapatan seseorang, bukan pada konsumsi. Pendapatan rendah adalah penyebab korupsi pribadi. Politik Dalam politik, korupsi terjadi karena kepentingan politik dan perolehan serta retensi kekuasaan. Seringkali dalam politik, hal ini dapat menciptakan rantai penyebab korupsi yang tidak terputus. Dari satu orang ke orang lain. Dimensi Manajemen Di sisi manajemen, banyak penyebab terjadinya korupsi, seperti kepemimpinan yang kurang, manajemen yang kurang baik, sistem manajemen yang kurang baik, dan lain-lain. Kelemahan dalam sistem manajemen operasional dan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan hubungan Antara nasib integritas nasional sekarang dengan tindakan korupsi yang semakin merajalela bahkan tindakan hukum sudah tidak lagi berguna apalagi kepada yang mempunyai kekuasaan. Dalam beberapa tahun ini, korupsi menyebar bagaikan virus ke seluruh pemerintah di Indonesia melalui media sosial, termasuk di kalangan mahasiswa. Universitas Negeri Medan (UNIMED) Yang merupakan salah satu Universitas pendidikan tertinggi di Indonesia, tentu memiliki peran dalam pembentukan generasi penerus bangsa yang lebih bermutu dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa Unimed masyarakat kurang sadar akan keterlibatannya dalam korupsi. Korupsi dapat dicegah dan dihilangkan jika berpartisipasi dalam program tentang maraknya tindakan korupsi yang menyebabkan hilangnya integritas nasional terutama di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

dan mengidentifikasi pandangan mahasiswa UNIMED sebagai generasi muda mengenai maraknya tindakan korupsi yang merusak integritas nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana mahasiswa UNIMED memandang korupsi di tingkat lokal dan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai perspektif mahasiswa UNIMED dalam memahami dan menghadapi korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, serta menjadi salah satu upaya untuk membangun bangsa yang berintegritas tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Refereni (Hunowu, 2019). Sedangkan, Deskriptif menurut Sugiyono (2020:64), adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dapat disimpulkan kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang ada di lapangan. Untuk memahami perspektif mahasiswa UNIMED. Data diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara ini digunakan peneliti dalam mencari data langsung ke narasumber. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mahasiswa memahami dan menghadapi korupsi demi menjaga integritas nasional bangsa Indonesia. Subjek dan objek merupakan sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai permasalahan yang akan dibuktikan secara objektif. Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik simpulan (Sugiyono dalam Tuna Jaya, 2017). Berdasarkan uraian di atas disimpulkan, bahwa Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Medan dengan subyek penelitian 1 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 1 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan penelitian ini dilaksanakan pada September 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara yang sudah di dapatkan di lapangan. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana persepektif mahasiswa dalam memahami dan menghadapi korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi dan kejahatan merupakan fenomena sosiologi endemik yang terjadi secara berkala di hampir semua negara di skala global dalam derajat dan proporsi yang berbeda beda. Data terkini menunjukkan korupsi sedang meningkat. Setiap negara mengalokasikan sumber daya domestik untuk pengendalian dan pengaturan korupsi dan pencegahan kejahatan. Strategi yang dilakukan dalam rangka memberantas korupsi sering dirangkum dalam istilah anti korupsi. Selain itu, inisiatif global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perserikatan Bangsa Bangsa juga memiliki target sasaran yang diharapkan dapat secara substansial mengurangi korupsi dalam segala bentuknya. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan/pemerintahan dalam praktiknya rentan terhadap korupsi. Tingkat keparahan korupsi bervariasi, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan

dukungan untuk memberi dan menerima bantuan, sampai pada korupsi paling serius yang bersifat formal, dan seterusnya. Kebalikan dari korupsi adalah pencurian, artinya pemerintahan yang dilakukan oleh pencuri, yang tidak ada rasa kejujurannya. Korupsi yang terjadi dalam politik dan birokrasi bisa kecil atau besar, terorganisir atau tidak efektif. Meskipun korupsi sering kali terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi bukanlah satu-satunya permasalahan. Untuk menyelidiki masalah ini dan mencari solusinya, penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung pada negara atau yurisdiksinya, apa yang dianggap korup atau tidak berbedabeda. Misalnya, pendanaan untuk pemilihan partai politik legal di satu tempat tetapi tidak legal di tempat lain.

Korupsi yang berdampak pada perekonomian memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya kemiskinan di masyarakat di seluruh negeri, kemiskinan absolut, dampak korupsi terhadap ketimpangan, munculnya kemiskinan relatif. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat besar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain merugikan negara, korupsi juga membuat masyarakat sengsara, membuat orang bodoh dan kelaparan hingga karena mahalnnya harga barang dan jasa publik, masyarakat menjadi semakin miskin, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kebutuhan ekonomi masyarakat semakin mendesak dan berbagai pembangunan menjadi terhambat, belum lagi dari sisi Adat dan budaya, korupsi menggerogoti kearifan lokal dan menggantinya dengan kebiasaan buruk akibat oknum yang menimbun harta dengan cara korupsi dengan menghalalkan segala cara, bahkan sampai bunuh diri asal bisa demi korupsi, sifat yang seperti ini tidak akan bisa dirubah karena sudah menjadi bawaan lahir dalam diri orang tersebut kecuali. Korupsi merupakan tantangan besar bagi pembangunan. Dalam dunia politik, korupsi melemahkan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan melemahkan formalitas. Korupsi dalam pemilu dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan keterwakilan dalam kebijakan. Korupsi dalam sistem hukum menghambat supremasi hukum. Korupsi dalam administrasi publik mengarah pada korupsi dalam urusan publik. Secara umum, korupsi melemahkan wewenang pemerintah dengan mengabaikan prosedur, menyia-nyikan sumber daya, dan menunjuk atau mempromosikan pejabat untuk menggantikan wewenang. Pada saat yang sama, korupsi melemahkan otoritas pemerintah dan nilai-nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Menurut J. Swedjati Giovandano, persatuan nasional merupakan sarana untuk memelihara kesatuan bangsa dalam arti umum dan kemerdekaan. Sunyoto Usman Menurut Sunyoto Usman, integrasi nasional adalah proses dimana beberapa kelompok dalam masyarakat menjaga keseimbangan di antara mereka sendiri agar hubungan antar kelompok tetap baik. Integrasi nasional adalah tindakan menyatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara untuk menjadi satu bangsa. Untuk mencapai persatuan bangsa, banyak faktor dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk dukungan seluruh lapisan masyarakat. Konsep dan pengertian integrasi nasional secara luas adalah upaya atau proses menyatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara untuk menciptakan keharmonisan nasional. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Di Indonesia, konsep persatuan bangsa sudah diterapkan dengan kuat. Mengingat karakteristik suku dan budaya masyarakat Indonesia, maka tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang penting dan perlu untuk mewujudkan keharmonisan bangsa dan pemerintahan di negeri ini. Namun, tidak mudah untuk mencapai persatuan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, harus ada partisipasi dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Selain hukum, nilai, dan tradisi yang dianut, hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mencapai persatuan bangsa. Dalam bekerja dan berprestasi di lapangan, loyalitas kebangsaan

mempunyai banyak syarat yang harus dicapai, karena tidak mungkin jujur dan kuat, termasuk di dalam negara dan pemerintahan. Syarat terpenting untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengakuan seluruh masyarakat bahwa hubungan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya mungkin terjadi jika partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menciptakan gagasan di masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dianut dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui standar hidup yang ditetapkan. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam pelaksanaan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Korupsi melemahkan integritas karena pejabat atau orang yang mempunyai kekuasaan melakukan kesalahan. Ketika penguasa terlibat dalam korupsi, mereka kehilangan kredibilitas dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga publik. Dalam hal ini, korupsi dapat merusak integritas institusi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Misalnya, dalam penganggaran publik, korupsi dapat menyebabkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek sosial malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kejujuran berperan penting dalam kasus korupsi.

Ketika seseorang memiliki rasa integritas yang kuat, kecil kemungkinannya untuk melakukan korupsi karena memiliki prinsip moral yang kuat dan berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya. Namun, jika seseorang tidak sepenuhnya jujur, dia mungkin bersalah atas perbuatan buruk. Kurangnya integritas membuat seseorang fokus pada kepentingan rakyat, sehingga ia memanipulasi situasi demi keuntungannya sendiri. Pada tingkat yang lebih besar, lemahnya integrasi otoritas, lembaga keuangan, dan dunia usaha dapat menjadi penyebab utama korupsi sistemik di suatu negara. Jika organisasi-organisasi ini tidak menganggap integritas sebagai nilai inti dan tidak menjaga tata kelola yang baik, korupsi akan berakibat fatal dan stabilitas ekonomi dan politik negara akan hancur. Oleh karena itu, kejujuran sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penting untuk memastikan bahwa individu dan lembaga bersikap jujur dan mendorong tata kelola yang baik untuk mencegah korupsi. Dari permasalahan yang dijelaskan sekarang ini rusaknya integritas suatu bangsa karena tindakan korupsi Kami sangat tertarik membahas materi mengenai perspektif mahasiswa terhadap tindakan korupsi yang merusak integritas bangsa. Sebagai generasi penerus, pandangan mahasiswa mencerminkan kesadaran moral dan sikap kritis terhadap masalah serius ini. Korupsi bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga melumpuhkan fondasi kepercayaan publik dan merusak pembangunan. Serta Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat besar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain merugikan negara, korupsi juga membuat masyarakat sengsara dan sangat susah menghilangkan sifat korupsi dinegara indonesia ini. Oleh karena itu diperlukan penguatan setiap warga Negara tentang pentingnya suatu integritas nasional untuk mempertahankan keharmonisan suatu Negara. Dengan memahami bagaimana mahasiswa memandang dan menolak segala bentuk korupsi, kita bisa melihat harapan bagi masa depan bangsa yang lebih transparan, adil, dan bermartabat. Berikut data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara mengenai perspektif mahasiswa terhadap korupsi yang merusak suatu integritas bangsa.

Tabel 1. Hasil Wawancara

No	Indikator	Narasumber 1	Narasumber 2
1	Menurut kamu apakah pantas suatu masyarakat	Ga pantas, karena hal ini cuman saat pilkada untuk	tidak setuju karna itu sudah termasuk suap walapun dalam waktu yang berskala kecil

	mendapatkan sembako/ sejenisnya di saat masa pilkada, apa alasannya?	mencari suara mungkin bahasa kasarnya, Kalau mmg mau bantu masyarakat harus tidak saat pilkada saja.	dan dari situ kita bisa lihat pemimpin yang ingin kita pilih sudah mulai menunjukkan bibit" suap
2	Pelamar kerja dalam pemerintahan/ negeri apakah layak ia mendapatkan suatu pekerjaan secara langsung tanpa seleksi murni karena adanya keluarga dalam pemerintahan tersebut, mengapa?	Ga pantas krn ga sesuai lagi hal tersebut dengan nilai Pancasila, karena hal ini sudah termasuk ke KKN kalau misal nya seperti itu berarti ga murni	saya tidak setuju karena seorang pelamar tersebut belum tentu bisa mengerjakan di bidang yang akan dipilih nya karena kita tahu bahwa kita punya bakat di bidang masing" bisa saja pelamar itu menjadi perusak dalam jabatan tersebut
3	Apa pandangan anda tentang korupsi ?	korupsi itu adalah perbuatan pengambilan yg bukan hak nya padahal hak tersebut pasti dibutuhkan bkn utk kepentingan pribadi	menurut saya orang yang korupsi wajib di hukum mati
4	Menurut anda bagaimana korupsi di Indonesia saat ini	Masih banyak, karena di lingkup kecil saja (organisasi kecil) masih banyak yang korupsi terlepas dari kecil besarnya yang di ambil.	Korupsi di Indonesia ini sangat merajalela karna pada dasarnya hukum di Indonesia ini tidak didirikan dengan tegak karena bias kita lihat banyaknya korupsi yang ujungnya akan mendapatkan hukuman yang ringan dibandingkan dengan seorang nenek yang mencuri kakao hukumannya lebih berat dan ada yang korupsi sampai 3 triliun dan hanya dipenjarakan 3 tahun dengan denda 5 rb dan ini menurut saya hal yang sangat tidak wajar

Berdasarkan tabel wawancara mengenai perspektif mahasiswa terkait korupsi, kita dapat menganalisisnya menggunakan teori sosial atau etika. Salah satu teori yang relevan untuk memahami pandangan ini adalah teori moralitas. Hasil penyelidikan pada pertanyaan pertama Immanuel Kant menekankan bahwa perbuatan moral harus didasarkan pada kewajiban dan tujuan, bukan pada hasil. Pandangan mahasiswa yang pertama mengenai pembagian apa yang diperlukan dalam pemilu/pilkada sejalan dengan prinsip Kant yang mengatakan bahwa "tidak perlu" karena bisa jadi merupakan cara untuk memperoleh suara. Di sini, persuasi dalam bentuk esensial dianggap tidak bermoral karena apapun dampak positifnya, melanggar norma kebenaran dan keadilan. Narasumber kedua juga menolak menyiapkan sembako pada pemilu/pilkada karena menilai praktik tersebut merupakan awal dari suap. Hal ini juga sejalan dengan Kant yang meyakini bahwa aktivitas seksual (yang memberi imbalan dalam bentuk apa pun) adalah tidak adil, meskipun konsekuensinya tidak jelas. Nepotisme dalam proses rekrutmen di pemerintahan, bisa dianggap sebagai bentuk korupsi. Nepotisme di sini berarti bahwa para kandidat diberikan pekerjaan tanpa seleksi yang adil karena adanya ikatan keluarga dengan pejabat pemerintah dan individu swasta. Jika penyelidikan ini dilihat melalui teori good governance dan teori keadilan John Rawls, maka terlihat pandangan kritis mahasiswa terhadap proses ini.

Tata kelola yang baik: Tata kelola yang baik mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Orang yang diwawancarai pertama merasa "tidak perlu" bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diseleksi berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Seleksi yang tidak adil melemahkan sistem merit yang menjadi dasar pelayanan pemerintah. Pewawancara kedua keberatan dengan praktik ini,

dengan mengatakan bahwa orang yang dipekerjakan karena hubungan keluarga mungkin tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk posisi tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yang mengharuskan mereka yang memegang jabatan publik mempunyai kualifikasi yang tepat dan dipilih secara transparan dan adil. Teori Keadilan John Rawls :Prinsip pembelaan ketidaktahuan yang dikemukakan John Rawls dalam buku *Theory of Justice*, kebijakan atau tindakan hendaknya dilihat dari sudut pandang keadilan yang menguntungkan semua orang, terutama orang-orang di dalamnya. Posisi Kelemahan Dalam konteks ini praktik nepotisme tidak benar karena menempatkan seseorang pada posisi berkuasa hanya karena ikatan kekeluargaan dan bukan karena kekuatan. Para mahasiswa yang diwawancarai mengetahui bahwa tanpa seleksi yang adil, banyak orang yang berhak akan tersingkir, sehingga melanggar prinsip kesetaraan yang dianut oleh Rawls. Pandangan narasumber kedua mengenai kemungkinan seseorang menjadi " koruptor " dalam jabatannya apabila tidak memiliki keterampilan yang sesuai , mendukung gagasan Rawls bahwa jabatan publik sebaiknya diduduki oleh mereka yang benar benar berkompeten untuk menghindari ketidakadilan terhadap mereka yang lebih berhak dan mencegah kerusakan pada sistem pemerintahan.

Dari perspektif teori Tata Kelola yang Baik dan Keadilan John Rawls, wawancara ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nepotisme, sebagai bentuk korupsi, merusak integritas nasional. Mereka memahami pentingnya proses seleksi yang adil dan transparan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas, di mana hanya individu yang kompeten yang seharusnya memegang posisi penting dalam pemerintahan. Berdasarkan pertanyaan ketiga dalam tabel, yang berfokus pada pandangan mahasiswa tentang korupsi, kita dapat melihat bahwa kedua orang yang diwawancarai memberikan pandangan yang kuat tentang korupsi. Ide-ide mereka harus dikaitkan dengan teori etika utilitarianisme dan teori etika Kant. Hasil penyelidikan berdasarkan teori utilitarianisme Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa tindakan moral mengarah pada kebahagiaan, atau manfaat terbesar bagi kebanyakan orang. Jika mempengaruhi pendapat mahasiswa tentang korupsi.

Narasumber 1 mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan merampas hak orang lain dan mengejar kepentingan pribadi. Dalam konteks pragmatis, pandangan ini menunjukkan bahwa korupsi merugikan masyarakat luas karena kepentingan pribadi pejabat yang korup didahulukan dari kepentingan publik. Korupsi, berlawanan dengan konsep utilitarianisme, berfokus pada peningkatan kebahagiaan semua pihak, menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan narasumber 2 memiliki pendapat yang lebih ekstrim , yakni koruptor sebaiknya dihukum mati. Dari sudut pandang utilitas, hukuman mati dapat dilihat sebagai cara untuk mencegah tindakan korupsi lebih lanjut di masa mendatang, dengan asumsi bahwa hukuman berat dapat memberikan efek jera yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, teori ini juga mengharuskan kita mempertimbangkan apakah hukuman mati benar benar memberikan hasil positif terbesar bagi masyarakat atau apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan ini. Hasil Wawancara Menurut Teori Moralitas Kant: Teori moralitas Kant yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan moral harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajiban, bukan konsekuensi. Menurut Kant, korupsi merupakan pelanggaran hukum moral universal, yang mana seseorang tidak boleh menggunakan orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi.

Pendapat narasumber 1 adalah korupsi adalah perampasan hak orang lain demi keuntungan diri sendiri, dalam teori Kant merupakan perbuatan yang tidak dapat diperbaiki.

Kant menekankan bahwa kita harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Dalam hal ini, korupsi, penyalahgunaan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi, apapun hasilnya, melanggar prinsip ini dan salah dan pendapat Narasumber 2 yang mendukung hukuman mati bagi korupsi juga dapat dipahami dalam konteks Kantian, karena Kant menganjurkan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Dalam konteks ini, hukuman mati dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menegakkan keadilan retributif, dimana mereka yang melakukan kejahatan berat (korupsi yang merusak bangsa) diberikan hukuman yang adil. Namun mari kita telaah apakah kalimat ini sesuai dengan prinsip keadilan Kant atau tidak. Di mata mahasiswa, korupsi dapat dianggap sebagai kegiatan yang merugikan seluruh bangsa dalam perspektif utilitarianisme dan Kantianisme. Dari sudut pandang praktis, korupsi menyebabkan penyakit sosial dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang Kant, korupsi merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dunia, karena tidak ada tindakan yang benar, apapun konsekuensinya. Kedua teori tersebut menekankan bahwa korupsi dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran moral yang serius dan harus diberantas demi menjaga keutuhan bangsa.

KESIMPULAN

Korupsi dapat menghancurkan kekuatan suatu bangsa. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa sebagian besar pelajar melihat korupsi sebagai ancaman nyata bagi negara. Mereka juga mengatakan bahwa korupsi menghancurkan masa depan kehidupan dunia, masyarakat dan perekonomian negara. Siswa juga akan belajar bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan saja, namun tersebar di berbagai sektor. Selain itu, mereka menilai upaya seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa sendiri, untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dan memperkuat semangat bangsa, sulit memulihkan kekuatan pulau tersebut. Mahasiswa mengatakan banyak faktor yang berkontribusi terhadap korupsi, termasuk lemahnya supremasi hukum, lemahnya budaya, dan kurangnya transparansi dalam birokrasi. Oleh karena itu, para pelajar menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak kecil dan penguatan nilai-nilai kejujuran sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, (2023) Faktor Penghambat Integrasi Nasional Indonesia, UMSU Press
Apriliya. F, 2023 Korupsi Merusak Integrasi Nasional Indonesia Dan Membatasi Kemajuan Sosial Ekonomi, Lima Detik-Lima Detik, Malang
Sari LN, 2021 Integrasi Nasional, Unpas